

Kiprah **AgroForestri**

Kontribusi nyata untuk lahan lestari dan masyarakat sejahtera

VOLUME 14 NO. 4 – APRIL 2026

Pendanaan Inovatif untuk Lanskap Berkelanjutan

Implementasi
TAKE, Bone
menjaga ekologi
hal. 8

Pemberdayaan
perempuan butuh
pembiayaan inovatif
hal. 14

Mengapa agroforestri
butuh pembiayaan
yang lebih sabar
hal. 18



9 772089 250997

ISSN: 2089-2500



Daftar Isi

- 3** Inovasi pendanaan inovatif untuk mewujudkan lanskap berkelanjutan di Indonesia
- 6** Menjemput insentif hijau: Pembelajaran dari Sumatera Selatan dalam Akselerasi Pendanaan RBP untuk Mitigasi Iklim
- 8** Implementasikan TAKE, Bone menjaga ekologi, desa lebih berdaya dan lestari
- 10** Small grant, big impact: Pendanaan inovatif untuk pemulihan lahan bekas terbakar di Sumatera Selatan
- 12** Dari pertanian ke olahan pangan: Kisah dua UMKM meraih dukungan Forum TJSL dan Bank Sumsel Babel
- 14** Pemberdayaan perempuan butuh pendanaan inovatif: Pelajaran dari inisiatif Sekolah Perempuan dari Timor Tengah Selatan
- 16** 'Modal Bertingkat' untuk stimulus ekonomi desa: Peran pembiayaan inovatif dalam menghasilkan produk siap pasar
- 18** Mengapa agroforestri butuh pembiayaan yang lebih sabar: Peran pembiayaan inovatif dalam mengatasi salah satu masalah terbesar agroforestri
- 19** Profil peneliti senior CIFOR-ICRAF James "Jim" Roshetko

Redaksi

Penanggung jawab

Andree Ekadinata

Pimpinan redaksi

Tikah Atikah

Wakil pimpinan redaksi

Pijar Anugerah

Kontributor

Beria Leimona, Andre Prasetyo, Erni, Yesi Lismawati, Syamsul Asinar, Ratnasari, Caecilia Yulita Novia, Thifali Adzani, Pijar Anugerah

Editor

Dony Indiarito, Erlangga, Dikdik Permadi, Seruni Fauzia Lestari, Ratnasari, Thifali Adzani, Dhian Rachmawati, Pijar Anugerah, Muhammad Fikri Fadhilah, Suraida Meisari, Andre Prasetyo, Faza Iza Mahezs

Desain dan tata letak

Riky Mulya Hilmansyah dan Muhammad Azizy

Foto sampul depan dan belakang

CIFOR-ICRAF Indonesia

Keterangan foto sampul

Petani Kopi di Bantaeng dan Gowa

Dari redaksi

Tantangan dalam mewujudkan lanskap berkelanjutan (*sustainable landscapes*) bukan hanya kendala teknis, namun juga pendanaan—dari mana datangnya, bagaimana cara mendapatkannya, dan siapa yang berhak mengaksesnya.

Pertanyaan itulah yang menggerakkan **Kiprah Agroforestri Vol. 14, No. 4, April 2026** dengan tema: Pendanaan Inovatif untuk Lanskap Berkelanjutan.

Edisi kali ini menghadirkan konsep, proses, hingga kisah nyata dari lapangan. Beria Leimona menjelaskan konsep inovasi pendanaan dan pembiayaan untuk mewujudkan lanskap berkelanjutan di Indonesia. Dilanjutkan dengan artikel Andre Prasetyo tentang pembelajaran implementasi Result-Based Payment di Sumatera Selatan, serta Erni melaporkan implementasi TAKE di Kabupaten Bone. Yesi Lismawati mengulas pendanaan inovatif untuk pemulihan lahan bekas terbakar di Sumatera Selatan, sementara Syamsul Asinar membuktikan UMKM pun bisa menjangkau dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Thifali Adzani menyoroti pendanaan inovatif untuk agroforestri, Ratnasari turut menyumbang perspektif pemberdayaan perempuan yang juga butuh pendanaan inovatif. Caecilia Yulita Novia mengingatkan bahwa investasi terpenting bukan selalu uang, melainkan juga kapasitas manusia.

Sebagai penutup, edisi ini menampilkan cuplikan profil peneliti senior CIFOR-ICRAF, James "Jim" Roshetko selama 28 tahun berkarya di CIFOR-ICRAF yang mana cerita lengkapnya tersedia secara online. Semoga edisi ini memperkaya pemahaman pembaca tentang konsep dan praktik pendanaan inovatif di Indonesia. Selamat membaca!

Selayang pandang CIFOR-ICRAF Indonesia

ICRAF dan pemerintah Indonesia mengukuhkan kerja sama yang telah berlangsung sejak tahun 1993 dengan menandatangani Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan ICRAF Indonesia pada 4 Maret 2026 di Jakarta. MoU yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Dr. Mahfudz dan Direktur Jenderal ICRAF, Dr. Éliane Ubaliqoro, mencakup kerja sama di bidang pengembangan model agroforestri, pengelolaan daerah aliran sungai, dan manajemen pengetahuan. Temu Wicara yang menyertai acara ini menghadirkan para pakar dan pemangku kepentingan lintas sektor untuk merumuskan landasan ilmiah bagi definisi dan standar agroforestri khas Indonesia.

Pada akhir 2025, program ECSAP bagian dari proyek GRASS-GIZ menuntaskan kegiatannya di

Kapuas Hulu. Pelatihan praktik Pertanian Cerdas Iklim dan agroforestri telah menghasilkan 100 penyuluh dan petani model (40% perempuan). Program ini juga mengembangkan enam kurikulum, delapan demplot, empat persemaian, serta platform digital pembelajaran mandiri yang dapat diakses melalui e-learning.agroforestri.id.

Sementara itu, bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, CIFOR-ICRAF Indonesia yang didukung proyek SOLUSI, menggelar Konsultasi Publik Rencana Induk Pengelolaan Terpadu Bentang Darat dan Laut sebagai bagian penyusunan Masterplan Regional PADAGIMO pada 18 Desember 2025 di Palu. Kegiatan ini membuka ruang bagi pemangku kepentingan untuk memberi masukan dan rekomendasi atas draf masterplan.

Kami mengajak pembaca untuk berbagi saran dan kritik mengenai Kiprah Agroforestri. Silahkan kirimkan ke email **kiprahagroforestri@cifor-icraf.org**. Untuk versi digital, dapat dilihat melalui blog dengan pindai QR di samping.



kiprahagroforestri.id/blog

CIFOR-ICRAF Program Indonesia

Jalan CIFOR, Situ Gede, Bogor Barat, Bogor, 16115, Indonesia

☎ 0251 8625415; ✉ cifor-icraf-indonesia@cifor-icraf.org

📷 X CIFOR_ICRAF_ID; 🌐 www.cifor-icraf.org/locations/asia/indonesia



Inovasi pendanaan inovatif untuk mewujudkan lanskap berkelanjutan di Indonesia



Foto 1. Daniel Murdiyarso (Senior Associate -CIFOR-ICRAF) memfasilitasi diskusi “Unlocking the Potential of Carbon Economic Value for Climate Action towards Indonesia’s FOLU Net Sink 2030” di COP 30, Brazil.



Beria Leimona

Theme Leader, Climate Change, Energy and Low-Carbon Development

b.leimona@CIFOR-ICRAF.org

Lanskap berkelanjutan semakin menjadi fokus diskusi internasional mengenai pembangunan dan perubahan iklim karena dianggap sebagai ruang ajaib yang mampu memadukan fungsi ekologis, produktivitas ekonomi, serta kesejahteraan manusia. Namun literatur menunjukkan bahwa upaya mencapai keberlanjutan lanskap sering kali terkendala oleh kurangnya insentif ekonomi yang memadai bagi para pemangku kepentingan utamanya di tingkat tapak. Praktik pengelolaan berkelanjutan seperti menjaga hutan, memulihkan gambut dan mangrove, atau

menerapkan pertanian cerdas iklim, sering kali tidak memberikan keuntungan langsung yang kompetitif dibandingkan praktik *business as usual* yang bersifat ekstraktif. Pasar selama ini lebih menghargai apa yang bisa dijual untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah, sementara jasa lingkungan yang tak kasat mata seperti udara bersih, serapan karbon, atau air yang jernih dari hulu jarang mendapat tempat dalam hitungan ekonomi.

Kesenjangan inilah yang memunculkan kebutuhan mendesak akan pendanaan dan pembiayaan inovatif, yang selanjutnya diistilahkan sebagai *innovative financing*. Pendekatan ini merupakan jembatan antara ekonomi dan ekologi melalui sistem insentif ekonomi untuk menjaga dan memulihkan fungsi

ekosistem. *Innovative financing* berperan mengoreksi kegagalan pasar dengan memberikan nilai finansial pada jasa lingkungan serta memperluas akses terhadap modal bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha yang ingin beralih menuju praktik berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan nasional, pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip pembangunan hijau (*green growth*) yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan harus berjalan beriringan. Di tingkat yurisdiksi, lanskap berkelanjutan merupakan elemen inti *green growth* karena menyediakan fondasi ekologis bagi berbagai sektor ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan sosial dan lingkungan.



Foto 2. Beria Leimona (Ketua Tim Tema Perubahan Iklim, Energi dan Pembangunan Rendah Karbon CIFOR-ICRAF) menjadi pemateri dalam sesi “Regenerating Forest and Empowering Local Communities” membahas tentang pendanaan inovatif untuk bentang alam berkelanjutan di COP 30, Brazil

Pendanaan dan Pembiayaan: dua konsep dasar dalam ranah ekonomi

Dalam *innovative financing*, ada dua istilah sering digunakan tetapi memiliki makna berbeda. Pendanaan merujuk pada cara memperoleh dana untuk menjalankan proyek atau program tertentu, biasanya berasal dari hibah, anggaran publik, atau donor internasional dan tidak menuntut pengembalian. Sebaliknya, pembiayaan adalah penyediaan modal atau pinjaman dengan kewajiban pengembalian atau pembagian hasil dalam jangka waktu tertentu yang relevan untuk kegiatan produktif yang memiliki arus kas. Kedua konsep ini menjadi dasar bagi pendanaan dan pembiayaan inovatif.

Pendekatan *innovative financing* merupakan skema yang menghimpun sumber dana baru, mengoptimalkan pendanaan dan pembiayaan tradisional, dan memobilisasi investasi tambahan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan.

Innovative financing juga membantu mengatasi hambatan kelembagaan seperti keterbatasan akses perhutanan sosial atau UMKM kehutanan terhadap modal, sekaligus mendukung agenda *green growth* di tingkat daerah melalui investasi yang lebih inklusif dan rendah karbon.

Ragam Skema Pembiayaan untuk Lanskap Indonesia

Indonesia memiliki beragam instrumen pendanaan dan pembiayaan yang dapat mendukung terwujudnya lanskap berkelanjutan. Pembayaran berbasis hasil merupakan salah satu instrumen yang penting, sebagaimana diterapkan dalam skema *Green Climate Fund (GCF) Readiness* atau REDD+, yang menyediakan pendanaan terjamin dari mitra internasional. Mekanisme ini mensyaratkan adanya kerangka kerja teknis yang kuat untuk menunjukkan kontribusi Indonesia dalam menurunkan emisi sektor berbasis lahan. Namun demikian, implementasinya sering

menghadapi tantangan terkait birokrasi raksasa dan rantai dana yang berliku-liku sehingga dapat memperlambat pemanfaatan dana di tingkat tapak.

Anggaran pemerintah desa merupakan instrumen penting karena memiliki alokasi tahunan yang stabil dan mekanisme perencanaan yang mapan melalui musyawarah desa. Namun memasukkan agenda mitigasi dan adaptasi iklim sebagai prioritas desa memerlukan fasilitasi intensif, terutama karena isu iklim sering belum dianggap sebagai kebutuhan mendesak atau belum diterjemahkan secara operasional ke dalam kegiatan yang dapat dibiayai. Salah satu pendekatan strategis untuk memperkuat integrasi isu lingkungan dalam perencanaan desa adalah melalui *Ecological Fiscal Transfer* yang merupakan mekanisme insentif fiskal dari pemerintah kabupaten kepada desa berdasarkan kinerja mereka dalam menjaga lingkungan dan mendorong keberlanjutan penggunaan lahan. Melalui pendekatan ini desa menerima alokasi tambahan ketika mereka menjaga tutupan hutan, melindungi sumber air, atau menerapkan praktik pertanian berkelanjutan sehingga tercipta insentif nyata bagi pemerintah desa untuk melakukan kegiatan-kegiatan pro lingkungan.

Di sisi lain sektor swasta melalui investor berdampak dan wirausaha sosial berperan signifikan dalam memperluas model bisnis hijau. Tantangannya adalah risiko investasi yang tinggi dan kebutuhan verifikasi dampak yang kompleks. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan menawarkan jalur pendanaan yang cepat dan fleksibel meskipun keberhasilannya bergantung pada kemampuan membangun kepercayaan antara

perusahaan dan masyarakat, dan kadang kala tidak secara spesifik menargetkan bagi kegiatan hijau yang sesuai dengan masalah di suatu lanskap. Pinjaman perbankan juga dapat mendorong usaha produktif, tetapi persyaratan jaminan, legalitas, dan kapasitas administrasi sering menjadi hambatan bagi petani kecil, terutama dalam menerapkan model bisnis hijau.

Dari beragam skema pendanaan tersebut, tidak ada satu instrumen pun yang dapat bekerja secara tunggal untuk mencapai keberlanjutan lanskap. Setiap instrumen memiliki kekuatan dan keterbatasan, sehingga efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan mengombinasikan berbagai sumber pendanaan sesuai karakter sosial dan ekologi setempat. Dengan pendekatan yang terkoordinasi, skema pendanaan publik, investasi swasta, dan insentif fiskal lokal dapat saling melengkapi untuk memperkuat transisi menuju lanskap yang lebih berkelanjutan.

***Tropical Forest Finance Facility* sebagai keputusan COP30 yang strategis**

Salah satu keputusan penting dari COP30 di Belém, Brasil, adalah pembentukan *Tropical Forest Finance Facility* atau TFFF. Fasilitas raksasa ini dirancang untuk memobilisasi pendanaan berskala besar bagi negara-negara berhutan tropis sebagai respons terhadap kesenjangan pendanaan global yang menghambat upaya mengurangi deforestasi dan memperkuat aksi iklim. Sebelum COP30 aliran

pendanaan untuk hutan tropis masih jauh dari cukup untuk mencapai target Paris Agreement.

TFFF menggabungkan hibah investasi swasta dan pembiayaan berbasis hasil dalam satu fasilitas yang terkoordinasi. Mekanisme ini mempercepat implementasi konservasi restorasi dan pengelolaan lanskap berkelanjutan melalui instrumen yang fleksibel dan mampu menjangkau aktor di tingkat lokal. Bagi Indonesia, TFFF membuka peluang strategis untuk menghubungkan pendanaan global hingga ke level yuridiksi terendah untuk mendorong kebutuhan pembangunan, terutama dalam konteks penerapan investasi lanskap terpadu dan *green growth*.

Pendekatan investasi lanskap terpadu

Pendekatan *innovative financing* global saat ini bergerak menuju investasi lanskap terpadu. Pendekatan ini memandang lanskap sebagai satu kesatuan sosial ekologi yang menggabungkan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat, produktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam, perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati, serta penguatan kohesi sosial. Bukan proyek tunggal, tapi pendekatan ini membangun portofolio sinergi antar-intervensi.

Investasi terpadu mempertimbangkan proses ekologis, interaksi spasial, dan dampak luar tapak serta selaras dengan rencana penggunaan lahan pemerintah. Melalui penyusunan visi dan rencana aksi secara partisipatif pendekatan

ini memastikan bahwa berbagai pemangku kepentingan memiliki peran dalam menentukan arah pembangunan. Ketika investasi dirancang secara terpadu potensi dampak sosial lingkungan dan ekonomi meningkat sekaligus memberikan peluang imbal hasil finansial jangka panjang. Pendekatan ini sekaligus mengoperasionalkan konsep *green growth* di tingkat yuridiksi karena pembangunan ekonomi diarahkan agar tetap menjaga integritas ekologis lanskap.

Arah investasi lanskap terpadu: pembelajaran dan peluang ke depan

Keberhasilan *innovative financing* lanskap bergantung pada desain yang terkoordinasi dan berbasis data, mencakup penilaian spasial pengukuran jasa ekosistem analisis kelayakan ekonomi dan pemahaman biaya transaksi. Mengandalkan satu instrumen pendanaan saja tidak cukup untuk menghadapi kompleksitas lanskap. Kombinasi pendanaan publik investasi swasta dan mekanisme berbasis hasil diperlukan agar perubahan nyata dapat terjadi. Dengan hadirnya TFFF sebagai hasil keputusan COP30 dan berkembangnya pendekatan *Ecological Fiscal Transfer* serta *green growth*, peluang Indonesia untuk memperkuat *innovative financing* lanskap berkelanjutan menjadi semakin besar. Integrasi *innovative financing* investasi terpadu dan tata kelola yang responsif menempatkan Indonesia pada jalur yang tepat menuju lanskap yang lebih produktif inklusif dan berketahanan.

Pembelajaran dari Sumatera Selatan dalam Akselerasi Pendanaan RBP untuk Mitigasi Iklim

Menjemput insentif hijau



Andre Prasetyo

Green Financing and
Stakeholder Engagement
Officer

a.prasetyo@cifor-icraf.org

Sebagai bentuk komitmen terhadap Paris Agreement, Indonesia mempertegas posisinya untuk berkontribusi aktif dalam aksi iklim melalui berbagai upaya mitigasi dan adaptasi. Salah satu inisiasi yang dikembangkan adalah REDD+, yaitu inisiatif global yang memberikan insentif kepada negara berkembang untuk menekan deforestasi dan degradasi hutan sebagai sumber utama emisi gas rumah kaca.

Namun demikian, upaya untuk mengurangi emisi di lapangan menuntut dukungan finansial yang sangat besar. Kapasitas pendanaan publik melalui APBN dan APBD yang selama ini menjadi tumpuan utama masih sangat terbatas dan hanya mampu menjangkau sebagian kecil dari total biaya restorasi. Menyadari keterbatasan tersebut, Pemerintah Indonesia

telah berupaya memobilisasi pendanaan dari beragam kanal, mulai dari sektor publik, swasta, hingga pendekatan berbasis pasar.

Mengenal *Result-Based Payment (RBP)*

Kesenjangan anggaran ini mendorong perlunya optimalisasi instrumen pendanaan inovatif untuk mempercepat pencapaian target iklim. Di antara berbagai pilihan yang ada, *Result Based Payment (RBP)* muncul sebagai skema yang cukup menjanjikan. Berbeda dengan pola pendanaan konvensional yang mengandalkan kucuran modal di awal kegiatan, RBP merupakan skema pembayaran insentif yang diberikan kepada sebuah negara setelah berhasil mencapai target pengurangan emis Gas Rumah Kaca (GRK), terutama dari sektor kehutanan, yang diukur dalam ton CO₂eq (karbon dioksida ekuivalen), dan terverifikasi secara independen.

Indonesia berhasil mengamankan dukungan pendanaan melalui Program RBP, seperti melalui Program *Indonesia-Norway Partnership* dan *Forest Carbon Partnership Facility (FCPF-Carbon Fund)*. Melengkapi capaian tersebut, Indonesia juga memperoleh pendanaan dari GCF senilai USD 103,8 juta atas keberhasilan penurunan emisi karbon periode 2014-2016 sebesar 20,25 juta ton CO₂eq. Dari total tersebut, pendanaan dibagi ke dalam 2 *output* utama, di mana porsi terbesar senilai USD 93,4 juta dialokasikan untuk *output 2* guna memperkuat tata kelola hutan di tingkat tapak.

Dalam implementasinya, RBP dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) dan disalurkan melalui dua skema yakni "skema langsung" melalui modalitas rencana kerja dan "skema lembaga perantara" melalui pengajuan *concept note* serta *funding proposal*. Penyaluran dana ini diarahkan ke penerima manfaat dan pelaksana program meliputi Pemerintah



Foto 1. Rapat pembahasan draf final concept note RBP



Foto 2. Rapat persiapan RBP BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan

Pusat melalui kementerian/ lembaga terkait serta 38 provinsi di seluruh wilayah Indonesia.

Pembelajaran dari Provinsi Sumatera Selatan

Bagi pemerintah daerah, skema RBP *Output 2* menjadi yang relevan karena ditujukan secara spesifik untuk memperkuat tata kelola hutan di tingkat tapak, termasuk perluasan Perhutanan Sosial, pengembangan Kesatuan Pengelola Hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta penguatan mata pencaharian berkelanjutan. Sejalan dengan tujuan tersebut, Sumatera Selatan menjadi provinsi yang paling progresif dalam menyusun strategi pemenuhan persyaratan RBP. Sinergi lintas instansi yang melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kehutanan, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan menjadi tulang punggung dalam mendukung inisiatif ini.

Di tahun 2024, Sumatera Selatan berhasil mengajukan *concept note* dan *funding proposal* melalui kerjasama dengan CIFOR-ICRAF Indonesia dan Yayasan Relung Indonesia sebagai lembaga

perantara. Dokumen *concept note* yang telah disusun merupakan instrumen strategis yang merinci peta jalan usulan program untuk skema RBP. Dokumen ini memuat informasi komprehensif terkait program, penerima manfaat, rincian kebutuhan pendanaan, serta rencana monitoring dan evaluasi.

Dengan durasi dua tahun, alokasi dana RBP di Sumatera Selatan diarahkan untuk memperkuat ekosistem mitigasi perubahan iklim dari tingkat kebijakan hingga ke akar rumput. Program mencakup rehabilitasi lahan kritis dan penguatan kapasitas kelembagaan, mulai dari level provinsi hingga ke tingkat desa guna menekan laju deforestasi dan degradasi hutan, dan perlindungan keanekaragaman hayati di luar kawasan konservasi. Pada aspek pemberdayaan masyarakat, penguatan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) menjadi instrumen kunci dalam meningkatkan kapasitas kelompok agar mampu mengelola hutan secara berkelanjutan. Secara struktural, program juga mendukung penyusunan regulasi di tingkat provinsi untuk memperkuat arsitektur REDD+ daerah. Terakhir, Program Kampung Iklim (Proklam) juga menjadi prioritas guna mengakselerasi pencapaian target *Nationally Determined Contribution* (NDC).

Membangun Kesiapan Implementasi RBP

Pengalaman Provinsi Sumatera Selatan dalam menggapai RBP membuktikan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk menghadirkan pembiayaan inovatif dalam pengelolaan hutan dan lahan. Meski demikian, pada beberapa kasus implementasi RBP di tingkat daerah menghadapi berbagai tantangan, termasuk kebutuhan akan pemahaman bersama terkait skema dan alur pengajuan RBP, kebutuhan akan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, hingga penentuan lokasi dan penerima manfaat yang menuntut ketersediaan data lapangan. Data pendukung yang akurat menjadi landasan kokoh untuk mempermudah pengajuan dan memperkuat sistem *Measurement, Reporting, and Verification* (MRV).

Selain adanya ketersediaan data lapangan yang akurat, keberhasilan implementasi RBP juga bergantung pada kelembagaan yang kuat, penerapan *safeguard* yang tepat, serta kolaborasi lintas sektor yang efektif. Pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan program, didukung dengan mekanisme pengaduan yang jelas, akan menambah transparansi dan akuntabilitas.

Dengan langkah-langkah ini, proses implementasi RBP dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi daerah dan masyarakat.

Implementasikan TAKE, Bone Menjaga Ekologi Desa Lebih Berdaya dan Lestari



Erni

Landscape Co-
Management and
Restoration Facilitator

erni@cifor-icraf.org

Di tingkat global, dunia tengah bergulat dengan kenyataan pahit bahwa pendanaan untuk menghadapi krisis iklim masih jauh dari cukup. Ironisnya, Indonesia menghadapi tantangan serupa. Indonesia membutuhkan pendanaan yang amat besar untuk menjalankan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, namun kenyataannya, anggaran justru kian terbatas. Proporsi pembiayaan yang seharusnya mendukung program berkelanjutan jangka panjang masih kurang diprioritaskan, mencerminkan dilema klasik antara pembangunan dan keberlanjutan. Jika di tingkat nasional saja situasinya sudah sesulit itu, bagaimana nasib pemerintah daerah yang harus berjuang dengan keterbatasan anggaran? Konsekuensinya bisa sangat fatal. Program iklim di banyak daerah berpotensi tertunda, bahkan terabaikan seolah perubahan iklim bisa menunggu hingga keadaan membaik.

Untungnya, kisah berbeda terjadi di Kabupaten Bone. Berbeda dari daerah lain yang mengurangi prioritas anggaran daerahnya untuk mempertangguh dalam menghadapi perubahan iklim, Bone justru menyikapinya dengan mengoptimalkan anggaran daerah melalui skema transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi (TAKE) kepada desa-desa.

Bekerjasama dengan CIFOR-ICRAF melalui Program Land4Lives yang didanai oleh Pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada (GAC), pemerintah Kabupaten Bone yakin jika skema TAKE akan memotivasi desa-desa dan masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan serta mengedepankan aspek keberlanjutan dalam pembangunan desanya. TAKE merupakan bentuk *Ecological Fiscal Transfers* (EFT) di tingkat kabupaten, di mana pemerintah kabupaten mengalokasikan dana lebih besar sebagai bentuk penghargaan ke desa-desa yang memiliki kinerja ekologi yang baik berdasarkan kriteria penilaian yang ditentukan.

Kabupaten Bone mengimplementasikan TAKE melalui Alokasi Dana Desa (ADD), yang tentunya didukung berbagai regulasi seperti UU No. 32/2009 tentang Jasa Lingkungan, PP No. 46/2017 tentang Instrumen Jasa Lingkungan, Peraturan Menteri Keuangan terkait,

plus wewenang diskresi fiskal yang dimiliki oleh Bupati. Pada awalnya, konsep TAKE ditolak keras oleh beberapa pemangku kepentingan. Wajar saja, karena menyangkut uang (isu sensitif) dan kurangnya pemahaman atas gagasan yang baru.

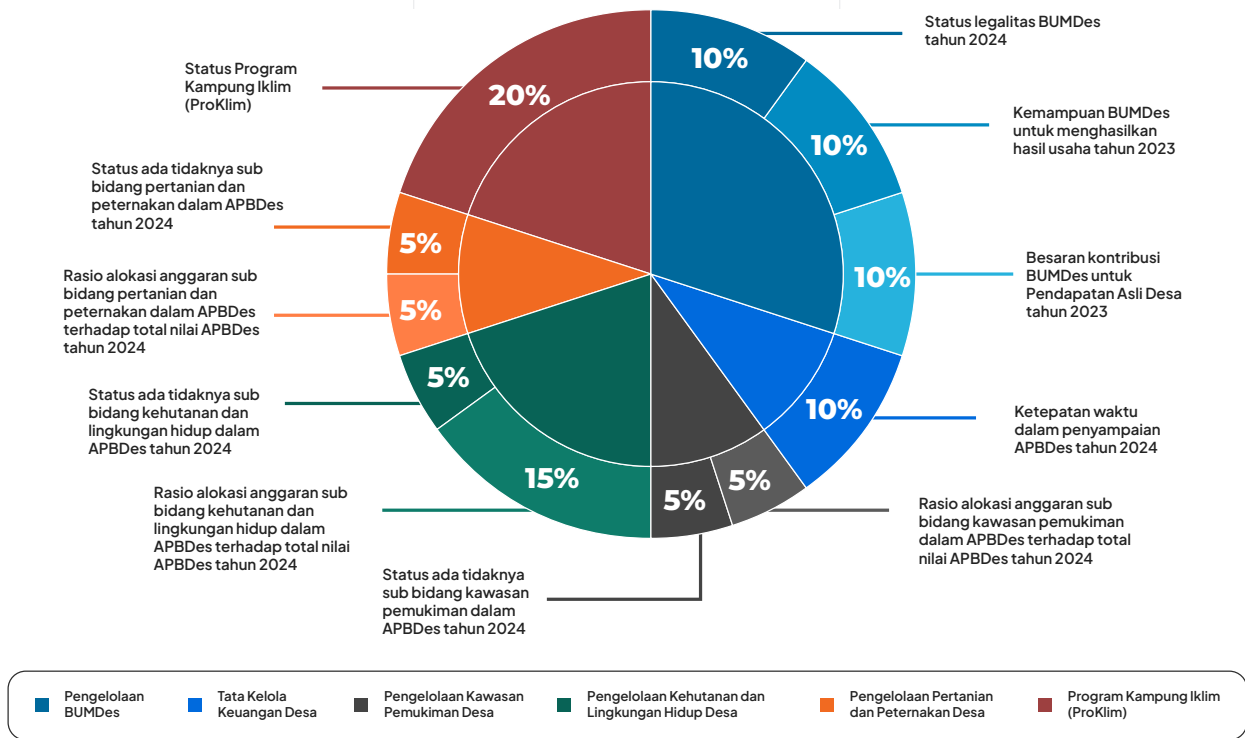
Namun, melalui diskusi intensif dan penguatan konsep yang mendalam dengan Bappeda Bone, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Dinas Lingkungan Hidup, dan pihak terkait lainnya, akhirnya disepakati konsep TAKE akan diimplementasikan di Bone (Foto 1).

Awalnya, TAKE ditujukan untuk memperbaiki pengelolaan dan pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Bone. Namun karena keterbatasan data dan cakupan yang tidak menyeluruh ke seluruh desa, kelompok kerja TAKE menyusun 5 kriteria sebagai ukuran penilaian kinerja desa yang dikenal dengan istilah Indeks Kinerja Desa (IKD). Kriteria penilaian TAKE Kabupaten Bone Tahun 2025 mencakup pengelolaan BUMDes, tata laksana pengelolaan keuangan desa, proporsi penggunaan dana desa untuk pengelolaan lingkungan hidup desa, pengelolaan kawasan pemukiman desa, pengelolaan pertanian dan peternakan desa serta desa yang terdaftar dalam program kampung iklim (Gambar 1).

Implementasi TAKE Kabupaten Bone Tahun 2025 tertuang dalam Peraturan Bupati No. 55, Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Retribusi Daerah Setiap Desa, yang mana besaran nilai penghargaan yang diterima sebanyak 100 dari 328 desa yang ada di Bone adalah sebesar Rp3 miliar. Desa Lilina Ajangale menempati rangking pertama dan mendapat dana penghargaan sebesar Rp39 juta. Sementara



Foto 1. Rapat kerja inisiasi implementasi TAKE di Kabupaten Bone



Gambar 1. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian untuk penerapan TAKE di Kabupaten Bone, Tahun 2025

itu, terdapat 3 desa dampingan CIFOR-ICRAF yang juga masuk dalam daftar penerima penghargaan tersebut yaitu Desa Hulo dan Desa Manggenrang Kecamatan Kahu, serta Desa Latellang Kecamatan Patimpeng.

Implementasi pertama TAKE mendapatkan tanggapan positif, salah satunya Mubarak, Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa. Ia melihatnya sebagai peluang emas untuk mengoptimalkan anggaran tanpa menambah APBD kabupaten, cukup melalui reformulasi alokasi ADD dengan penambahan

jenis alokasi baru yaitu Alokasi Kinerja Desa (AKD) berbasis indikator kinerja berkelanjutan. Skema ini mewajibkan desa mengalokasikan Dana Desa untuk mitigasi iklim dan peningkatan produksi pangan, sekaligus mengukur komitmen mereka terhadap isu lingkungan. Langkah cerdas ini selaras dengan PMK No. 108/2024 Pasal 17, yang mengutamakan penguatan desa adaptif terhadap perubahan iklim, reformasi pro-lingkungan tanpa beban fiskal baru.

Implementasi TAKE pertama di Bone bukan sekadar permulaan, tapi pemicu untuk memperkuat kolaborasi para pihak untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan intensif kepada pemerintah desa agar penggunaan anggaran dapat lebih optimal pada tahun-tahun berikutnya. Upaya ini juga untuk meningkatkan kapasitas, mengarusutamakan kebijakan TAKE dalam RPJMD dan dokumen perencanaan daerah, serta melaksanakan proses monitoring dan evaluasi untuk memastikan implementasi TAKE berjalan berkelanjutan dan berdampak nyata.



Foto 2. Rapat kerja Tim Pokja Pengelolaan Bentang lahan untuk penentuan indikator penilaian TAKE di kabupaten Bone



Foto 3. Sosialisasi implemmentasi TAKE di Kabupaten Bone bersama Wakil Bupati Bone dan perwakilan Global Affairs Canada (GAC)



Foto 1. Pelatihan agroforestri kopi liberika sebagai upaya peningkatan kapasitas KMPA Bromo Sakti

Pendanaan inovatif untuk pemulihan lahan bekas terbakar di Sumatera Selatan

Small grant, big impact



Yesi Lismawati

Land4Lives Field Specialist

y.lismawati@cifor-icraf.org

Memulihkan lahan bekas terbakar butuh duit yang tak sedikit. Kenyataan itulah yang dihadapi Kelompok Masyarakat Peduli Api (KMPA) Bromo Sakti ketika hendak mengembalikan lahan bekas kebakaran hebat di sebuah dusun di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menjadi lahan yang produktif kembali. Siapa sangka, ternyata misi mereka bisa mendapatkan dukungan dari skema pendanaan nasional yang amat kompetitif.

Keberhasilan KMPA Bromo Sakti menjadi penerima manfaat Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan - FOLU Net Sink 2030 membuktikan bahwa komitmen dan kerja kolektif mampu mengangkat kapasitas kelompok di tingkat tapak menjadi aktor restorasi yang diperhitungkan secara nasional.

Melalui skema ini, mereka mendapat dana sebesar Rp30.000.000 untuk memulai pemulihan lahan seluas 2 hektare sebagai tahap awal melalui praktik agroforestri kopi liberika, mulai dari pengadaan bibit hingga peningkatan kapasitas kelompok.

Proses panjang untuk mendapatkan pendanaan tersebut dimulai dari keberanian dan komitmen kolektif untuk memulihkan lahan bekas kebakaran yang terbengkalai sejak 2019. Lahan yang pernah menjadi kebun kopi liberika dan nanas itu dipenuhi semak-semak dan berisiko kembali terbakar.

Skema pendanaan FOLU Net Sink 2030 dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) memberi peluang. Didampingi CIFOR-ICRAF Indonesia melalui Land4Lives yang didanai oleh Pemerintah Kanada, KMPA Bromo Sakti mengikuti rangkaian proses pendaftaran untuk mengakses kelembagaan.

Mengakses skema pendanaan

Rangkaian tersebut dimulai dengan registrasi kelembagaan ke dalam sistem LDM BPDH untuk memastikan legalitas dan struktur organisasi. Tahap selanjutnya ialah pengumpulan gagasan program yang relevan dengan tujuan FOLU Net Sink yaitu restorasi, pengurangan risiko kebakaran, dan peningkatan tutupan vegetasi. Terakhir, penyusunan proposal yang mencakup rencana teknis, target pemulihan, indikator capaian, rencana anggaran dan kesiapan kelembagaan dalam mengelola dana setelah pencairan.

Sepanjang proses ini, CIFOR-ICRAF Indonesia memberikan pendampingan dalam bentuk tiga kegiatan. Pertama, pelatihan manajemen bisnis dan penyusunan rencana usaha pengembangan kopi liberika sebagai komoditas agroforestri.



Foto 2. Pendampingan penyusunan rencana kerja praktik budidaya kopi liberika

Kedua, pendampingan dalam penyusunan proposal, mulai dari mengidentifikasi masalah hingga memastikan proposal sesuai standar teknis pendanaan. Ketiga, pengenalan strategi akses pembiayaan inovatif sehingga KMPA tidak hanya memahami aspek teknis, tetapi juga mampu membaca peluang pendanaan. Kegiatan-kegiatan ini membantu kelompok memahami cara mengelola bisnis kopi secara berkelanjutan.

“Saya yang sebelumnya tidak tahu apa-apa tentang bisnis kopi, sekarang bisa menyusun proposal dan merencanakan usaha. Anak-anak muda di sini jadi lebih positif kegiatannya” ujar Alex, anggota KMPA Bromo Sakti.

Pengalaman dan rekam jejak KMPA Bromo Sakti sebagai garda terdepan pencegahan kebakaran menjadi modal teknis yang kuat sekaligus menunjukkan kedekatan dengan kondisi lanskap. Walaupun tanaman kopi liberika dan nanas pernah hangus terbakar, KMPA Bromo Sakti sudah mengenal dan menerapkan prinsip agroforestri, sehingga rencana restorasi lahan pasca kebakaran ini relevan dan realistis.

Kekuatan lainnya juga terdapat pada kelembagaan internal KMPA Bromo Sakti. Pembagian peran yang jelas, komitmen terhadap

transparansi anggaran, serta kesiapan melakukan pertanggung jawaban menjadi nilai tambah yang membuat kelompok mereka lebih kompetitif.

Memilih agroforestri

Pemulihan lahan pasca kebakaran bukan hanya soal menanam kembali. Tantangannya adalah memastikan lahan kembali produktif, aman dari kebakaran, dan memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. Praktik yang cocok untuk tujuan tersebut adalah agroforestri.

Setelah diskusi bersama CIFOR-ICRAF serta mempertimbangkan kondisi lahan, agroforestri kopi liberika muncul sebagai pilihan strategis karena dapat meningkatkan kelembapan gambut dan menurunkan risiko kebakaran. Lebih dari itu, praktik ini akan menambah tutupan vegetasi, serapan karbon, serta memperkuat ketahanan lanskap terhadap peristiwa iklim. Pengalaman KMPA Bromo Sakti mengelola lahan dengan prinsip agroforestri juga memperkuat sistem yang terencana dan adaptif terhadap lahan gambut.

Dengan dana yang diterima dari BPD LH, KMPA Bromo Sakti melakukan pembelian bibit kopi dan melaksanakan pelatihan agroforestri kopi bersama Dinas

Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, UPTD KPH Lalan Mendis, dan CIFOR-ICRAF. Materi pelatihan meliputi pembibitan, penanaman, hingga penyusunan *Business Model Canvas* secara partisipatif. Proses dilanjutkan dengan visitasi lokasi dan penyusunan rencana tindak lanjut.

KMPA Bromo Sakti membuktikan bahwa pendanaan inovatif lebih dari sekadar bantuan finansial – ia menghubungkan komitmen masyarakat dengan kapasitas untuk bertindak.

Transformasi mereka dari menjadi pemulih lanskap menunjukkan potensi pendanaan inovatif dalam menggerakkan restorasi berbasis masyarakat. Ini berarti, keberhasilan kelompok ini dalam mengakses skema FOLU Net Sink 2030 bukan hanya kemenangan individual tapi juga preseden bagi kelompok masyarakat lain yang menghadapi tantangan serupa.

Skema seperti FOLU Net Sink 2030 memberikan alternatif pembiayaan bagi komunitas lokal dalam melaksanakan kerja-kerja lingkungan. Dengan model pendanaan yang membuka akses bagi aktor tapak dan memperkuat kapasitas mereka, Indonesia berpeluang untuk melipatgandakan upaya restorasi—tidak hanya melalui proyek-proyek besar yang sentralistik, tetapi juga inisiatif kolektif yang tumbuh dari bawah.



Foto 3. Survey lokasi kebun kopi milik masyarakat di lahan gambut untuk mengidentifikasi tingkat adaptasi tanaman kopi sebagai komoditas agroforestri

Dari pertanian ke olahan pangan

Kisah dua UMKM meraih dukungan Forum TJSL dan Bank Sumsel Babel



Syamsul Asinar

South Sumatra Enterprise
Development Facilitator

s.asinar@cifor-icraf.org

UMKM di pedesaan merupakan penopang penting ekonomi lokal, namun memiliki berbagai keterbatasan. Sebagian besar masih berskala kecil, bersifat rintisan, dengan akumulasi modal yang lambat serta kemampuan adopsi teknologi yang terbatas. Kondisi ini diperparah oleh jarak ke pasar dan infrastruktur yang kurang memadai, sehingga banyak pelaku UMKM desa sulit meningkatkan daya saing usahanya.

Situasi serupa dialami oleh dua UMKM binaan CIFOR-ICRAF di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, yakni UMKM Kelompok Wanita Tani (KWT) Srikandi di Desa Ganesha Mukti, Kecamatan Muara Sugihan dan Kelompok Bunga Pelaju di Desa Pelaju, Kecamatan Rambutan. Keduanya digerakkan oleh para petani perempuan pedesaan yang melakukan usaha produktif di bidang pengolahan pangan menjadi makanan ringan.

Merintis asa di pekarangan

KWT Srikandi, pada awalnya merintis budidaya sayuran melalui pertanian cerdas iklim berbasis agroforestri di pekarangan rumah setiap anggotanya, untuk pemenuhan gizi keluarga. Kelebihan hasil panen diharapkan dapat diperjual-belikan untuk menambah pendapatan ekonomi. Namun keterbatasan lahan membuat hasil panen relatif kecil sehingga tujuan ekonomi sulit tercapai.

Sebagai alternatif, KWT Srikandi membentuk unit usaha “Bank Sayur” agar hasil panen dari setiap anggota dapat dikumpulkan lalu dipasarkan bersama. Sayangnya, sayuran segar memiliki batasan umur simpan dan harga yang cukup rendah. Kondisi tersebut mengantarkan kelompok yang beranggotakan 38 petani perempuan ini untuk berinovasi membentuk unit usaha khusus pengolahan pangan bernama “Nyanding Keripik” untuk menambahkan nilai jual pada hasil panen sekaligus memperpanjang umur simpan.

Kelompok Bunga Pelaju punya cerita hampir serupa. Bermula dari menanam sayur di pekarangan, kelompok yang digerakkan 20 perempuan ini berinovasi mengembangkan produk keripik bayam. Pada tahap awal produksi, keripik terlalu berminyak, sehingga cepat tengik dan kurang layak jual.

Tak hilang akal, mereka kemudian menyesuaikan produksi dengan pesanan. Promosi dilakukan

melalui media sosial dan WhatsApp, disertai diversifikasi produk seperti pangsit bayam dan stik bayam.

Namun, kedua inisiasi ini menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari minimnya modal, terbatasnya pengetahuan keamanan pangan dan standardisasi mutu, hingga sarana produksi serta kemampuan branding dan pemasaran.

Meski banyak keterbatasan, kedua kelompok tetap termotivasi untuk mencari jalan keluar. Mereka berupaya membangun usaha bersama secara transparan dengan pembagian tugas yang jelas, hingga mengembangkan produk turunan. Melalui program Land4Lives, yang didukung pemerintah Kanada, CIFOR-ICRAF mendampingi mereka dalam kegiatan belajar manajemen usaha, pencatatan keuangan, standardisasi keamanan pangan, sertifikasi P-IRT, strategi pemasaran, hingga akses pembiayaan inovatif.

Dukungan untuk berkembang

Salah satu peluang pembiayaan inovatif yang tersedia bagi UMKM adalah program Corporate Social Responsibility (CSR) atau disebut juga Tanjung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). CSR atau TJSL adalah komitmen perusahaan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat secara berkelanjutan.

Pemerintah daerah memiliki tugas sebagai fasilitator bagaimana dana TJSL terimplementasikan dengan baik. Di Kabupaten



Foto 1. Diskusi antara Bappeda, Forum TJSL, dan Tim CSR Bank Sumsel Babel dengan anggota Unit Usaha Nyanding Keripik KWT Srikandi dalam kegiatan Survey Lapangan.



Foto 2. Serah terima bantuan CSR Bank Sumsel Babel ke Kelompok Usaha / UMKM KWT Srikandi (kiri) dan UMKM Bunga Pelaju (kanan)

Banyuasin misalnya, Forum TJSL dibentuk sebagai wadah koordinasi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat dengan dasar hukum yang jelas. Forum ini bertujuan menyelaraskan program perusahaan dengan prioritas pembangunan daerah—seperti peningkatan kualitas SDM, pengurangan kemiskinan, penguatan pertanian, dan pelestarian lingkungan—serta mendorong pelaporan dan evaluasi yang lebih transparan.

Mengetahui kesempatan itu, KWT Srikandi dan Bunga Pelaju mulai mengidentifikasi kebutuhan dan arah pengembangan usaha menjadi proposal. Dengan dukungan Forum TJSL Banyuasin, proposal tersebut kemudian diajukan kepada Bank Sumsel Babel.

Dalam prosesnya, proposal dinilai berdasarkan aspek keberlanjutan, akuntabilitas, transparansi, serta kesesuaian dengan visi-misi perusahaan,

dengan mempertimbangkan analisis kebutuhan komunitas, dampak sosial-lingkungan, dan keterlibatan pemangku kepentingan untuk menjamin keberlanjutan jangka panjang. Karena itu, perusahaan umumnya lebih menyukai pendekatan berbasis komunitas dalam penyaluran TJSL karena dinilai lebih berdampak, terukur, dan berkelanjutan.

Upaya yang berbuah manis

Berkat ketelatenan anggota serta pendampingan intensif dari lembaga pendamping, Kelompok Bunga Pelaju dan KWT Srikandi aktif mengikuti berbagai pameran UMKM. Partisipasi tersebut membuka jalan bagi kedua kelompok untuk memperoleh pengakuan dan perhatian dari OPD pemerintah.

Melalui Forum TJSL, kedua kelompok kemudian dinilai layak menerima dukungan dari program

TJSL Bank Sumsel Babel pada 18 November 2025. Bantuan yang diberikan berupa peralatan penunjang produksi pangan olahan, yaitu tiga mesin peniris minyak (spinner), satu unit food mixer, dan empat unit kompor gas untuk memperkuat kegiatan unit usaha “Nyanding Keripik” yang telah berjalan.

Dengan dukungan pembiayaan inovatif TJSL ini, KWT Srikandi dan Kelompok Bunga Pelaju diharapkan dapat menjadi contoh bagi UMKM pedesaan dalam mengakses dukungan pembiayaan inovatif.

Kisah mereka menjadi bukti bahwa kegiatan UMKM bukan sekadar pengisi waktu luang, melainkan penguat modal sosial yang menumbuhkan semangat kemandirian masyarakat, ketahanan pangan, serta peningkatan kesetaraan gender dalam pengembangan ekonomi hijau yang berkeadilan.

Anugerah Yuliadi berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Kotak Informasi

Berdasarkan sifatnya, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dapat dibagi ke dalam 4 kategori:

1. Tanggung jawab filantropi berwujud kegiatan *charity*, pemberian bantuan atau donasi perusahaan terhadap bencana alam atau santunan kemanusiaan.
2. Tanggung jawab etis, misalnya program pengurangan resiko terhadap pelanggaran HAM, membangun hubungan baik dengan para pihak, dan sumbangsih pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan global.
3. Tanggung jawab Lingkungan, misal pelaksanaan program konservasi keanekaragaman hayati maupun aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
4. Tanggung jawab sosial ekonomi dalam bentuk bantuan pengembangan mata pencaharian masyarakat, dukungan terhadap kelompok usaha, dan kegiatan pemberdayaan lainnya.

Pemberdayaan perempuan butuh pendanaan inovatif

Pelajaran dari inisiatif Sekolah Perempuan di Timor Tengah Selatan



Ratnasari

Landscape and Livelihood Gender Specialist

ratnasari@cifor-icraf.org

Sejak 2024, Sekolah Perempuan di beberapa desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur dibiayai sebagian besarnya secara swadaya. Pendanaan inovatif, terutama dana desa, akan mendukung keberlangsungan inisiatif ini.

Sekolah Perempuan (Sekoper), atau Skolbife dalam bahasa lokal, merupakan inisiatif pendidikan informal di Kabupaten TTS untuk meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri perempuan agar dapat memanfaatkan potensi lingkungan dan program pembangunan. Program ini diinisiasi oleh Pendeta Seprianus Adonis pada 2022 di Desa Neke, dan belakangan didukung oleh CIFOR-ICRAF Indonesia melalui

riset-aksi Land4Lives yang didanai oleh Pemerintah Kanada. Mama-mama peserta Skolbife melaporkan banyak manfaat yang mereka dapatkan, terutama peningkatan rasa percaya diri serta keterampilan dalam mengolah hasil kebun menjadi produk yang bisa dijual.

Keberhasilan Skolbife di Neke kemudian menginspirasi Gereja Masehi Injili Timor (GMIT) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk mereplikasinya di desa-desa lain di TTS. Hingga kini telah terbentuk 38 kelompok di 28 desa dan tercatat ada 26 kelompok sekolah perempuan yang aktif pada 2025.

Sebagian besar Skolbife ini didanai secara swadaya. Contohnya, Skolbife Nekmese Nakfumu menjalankan kegiatan murni dari swadaya hasil usaha olahan pangan

dan tenun. Demikian pula Skolbife Mnelalete, yang hanya mengandalkan dari iuran peserta dan fasilitator. Keswadayaan yang tinggi membuktikan adanya rasa kepemilikan dalam sekolah perempuan.

Namun, dana swadaya saja belum cukup; pelaksanaan sekolah perempuan mesti ditopang oleh dana eksternal. Pendanaan ini sifatnya hanya stimulan, bukan untuk membuat Sekoper menjadi tergantung – kemandirian adalah basis keberlangsungan sekolah perempuan – melainkan membantu Sekolah Perempuan untuk mewujudkan visinya.

Beberapa Sekoper yang masuk dalam program gereja mendapatkan dana dari GMIT. Bagi yang lainnya, salah satu sumber pembiayaan yang potensial untuk dimanfaatkan adalah dana desa — karena Sekoper berbasis di desa.

Pada September 2024, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) TTS, camat, dan kepala desa menandatangani komitmen bersama – disaksikan CIFOR-ICRAF Indonesia – bahwa alokasi dana desa menjadi salah satu sumber pendanaan untuk Skolbife. Namun, pada praktiknya ternyata tidak mudah untuk mengakses dana ini.

“Pernah mengajukan ke pemerintah desa tapi nihil, alasannya tidak ada celah untuk kegiatan sekolah perempuan dalam dana desa” ungkap Imelda, koordinator Skolbife Kesetnana di Kecamatan Mollo Selatan.

Alokasi dana desa untuk Sekolah Perempuan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan pemberdayaan perempuan sebagai salah satu prioritas



Foto 1. Diskusi kelompok Sekoper



Foto 2. (a) Foto bersama penanda tangan komitmen, (b) Presentasi hasil diskusi kelompok

dana desa. Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 menyebutkan keterlibatan perempuan desa sebagai salah satu Strategic Development Goals (SDGs) Desa. Pemerintah desa dapat memenuhi tujuan ini dengan melibatkan perempuan dalam musyawarah desa dan mendukung program-program pemberdayaan perempuan.

Beberapa pengurus sekolah perempuan telah berupaya untuk mengusulkan kegiatan sekolah perempuan dalam musyawarah desa namun tidak berbuah manis. Dalam kegagalan ini, kami mengidentifikasi salah satu tantangan dalam pemberdayaan perempuan di desa: partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan masih bersifat simbolis; artinya usulan dari perempuan belum dipertimbangkan dan dianggarkan secara proporsional.

Menurut penulis, banyak pemerintah desa di TTS menganggap pemberdayaan perempuan kurang prioritas dibandingkan pembangunan infrastruktur fisik, yang sering kali mendominasi anggaran desa. Selain itu, mereka mengalami keterbatasan SDM dalam mengelola, merencanakan, dan mempertanggungjawabkan alokasi dana desa.

Meski begitu, ada juga beberapa sekolah perempuan yang berhasil menerima alokasi dana desa. Skolbife Fetomone Bone misalnya menerima dana desa sebesar Rp 10 juta untuk kegiatan praktik pengolahan pangan dan anyaman. Contoh lain seperti Skolbife Niki-niki Un yang menerima dana desa untuk kegiatan praktik tenun sebesar Rp 5 juta, demikian juga Skolbife Imanuel Noebesa yang menerima dana desa untuk kegiatan praktik pencelupan benang sebesar Rp 2,5 juta.

Sebagian besar alokasi dana desa untuk Sekolah Perempuan berupa material atau pengadaan barang untuk usaha produktif, seperti benang untuk tenun ataupun bahan praktik pengolahan pangan — belum menysasar operasional sekolah perempuan. Padahal, pelaksanaan sekolah perempuan membutuhkan bahan belajar termasuk ATK, konsumsi peserta, penggantian transportasi fasilitator, dan peningkatan kapasitas fasilitator.

Memperkuat posisi perempuan

Supaya Sekolah Perempuan dapat mengakses dana desa, posisi perempuan dalam proses perencanaan anggaran perlu diperkuat. Perempuan harus memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan dan

memastikan bahwa alokasi dana desa benar-benar terintegrasi dengan kebutuhan perempuan.

Di sisi lain, aparat desa perlu memahami program pemberdayaan perempuan sebagai kegiatan strategis dalam pembangunan desa. Mereka juga perlu lebih mumpuni dalam mengelola dana desa dan akuntabel dalam melaporkannya. Dalam perkara ini, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga mitra dapat berkolaborasi untuk meningkatkan kapasitas aparat desa.

Sekolah Perempuan juga dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan mitra untuk menggalang pendanaan selain dana desa. Misalnya, dengan mengampanyekan produk hasil usaha kelompok, menghubungkan dengan donor, dan memperluas dukungan bagi inisiatif ini melalui media sosial.

Sekecil apapun upaya yang dilakukan akan berarti bagi sekolah perempuan dalam mengkader pemimpin mandiri, berkarakter, memperjuangkan kesetaraan-keadilan gender serta ramah alam dan budaya.

'Modal Bertingkat' untuk stimulus ekonomi desa

Peran pembiayaan inovatif dalam menghasilkan produk siap pasar



Caecilia Yulita Novia

Research Officer –
Sustainable Commodities
& Market Development

c.novia@cifor-icraf.org

Selama ini, modal usaha kerap dimaknai secara sempit berupa uang. Padahal, modal dapat hadir dalam bentuk lain yang jauh lebih menentukan seperti pengetahuan, keterampilan, jejaring, dan keberanian untuk mencoba hal baru.

Di tengah tantangan perubahan iklim dan keterbatasan akses pembiayaan konvensional, desa-desa dituntut menemukan pendekatan yang lebih cerdas, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Desa Ganesa Mukti di Kabupaten Musi Banyuasin memberikan contoh kuat bahwa pengembangan ekonomi desa tidak selalu harus dimulai dari kucuran dana tunai, melainkan dari skema pembiayaan inovatif yang memperkuat kapasitas teknis, kelembagaan, serta akses ke pasar.

Desa Ganesa Mukti yang dikenal sebagai salah satu sentra produksi padi, menghasilkan limbah sekam dalam jumlah besar di setiap musim panen. Selama bertahun-tahun, sekam padi dianggap tidak bernilai dan dibakar begitu saja di ruang terbuka. Praktik ini menimbulkan polusi udara, mengganggu kesehatan warga, serta berkontribusi pada peningkatan emisi karbon.

Kondisi tersebut memicu kegelisahan Jumadi, seorang petani sekaligus ketua kelompok tani binaan CIFOR-ICRAF yang beranggotakan para petani, termasuk ibu-ibu. Bersama para anggotanya, ia kerap bereksperimen secara otodidak untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk, pestisida, dan herbisida kimia. Dengan peralatan sederhana seperti kaleng bekas dan memanfaatkan rumah produksi kecil-kecilan, mereka mulai merintis pembuatan biochar dari sekam padi untuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian sendiri.

Awal transformasi ekonomi sirkular desa

Momentum perubahan datang ketika CIFOR-ICRAF memberikan pelatihan pertanian cerdas iklim, pengembangan bisnis, serta memperkenalkan pemahaman pemanfaatan model pembiayaan inovatif yang digunakan dalam memproduksi biochar. Pelatihan ini semakin membuka wawasan bahwa limbah pertanian dan/atau peternakan sebenarnya bisa dipasarkan dalam skala yang lebih luas dan menghasilkan pendapatan tambahan bagi petani. Gagasan ini disambut antusias oleh Kelompok Karya Tani. Sekam padi tidak lagi dimanfaatkan sebatas penggunaan pribadi tetapi dapat diubah menjadi produk bernilai ekonomi, sosial, dan lingkungan sekaligus. Di sinilah transformasi ekonomi sirkular desa dimulai.

Dalam upaya menjembatani Kelompok Usaha Karya Tani dengan salah satu sumber pembiayaan inovatif, CIFOR-ICRAF menghubungkannya dengan UNSRI. Pembiayaan inovatif dalam konteks ini dapat dipahami sebagai upaya untuk memobilisasi sumber daya tambahan guna mendukung pengembangan usaha, khususnya dengan mengatasi berbagai hambatan yang selama ini membatasi akses kelompok usaha terhadap sumber pendanaan dan pembiayaan formal.

Universitas Sriwijaya (UNSRI) dinilai sebagai mitra yang tepat karena memiliki rekam jejak riset serta pengalaman panjang dalam pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna untuk



Foto 1. Limbah bukan akhir cerita, justru awal peluang baru - produk biochar yang telah dikemas dan siap dipasarkan oleh kelompok Karya Tani

pengolahan limbah pertanian dan/atau peternakan. Kolaborasi ini menjadi krusial karena memastikan teknologi yang diterapkan benar-benar sesuai dengan konteks lokal desa dan kapasitas masyarakat setempat. Pendekatan berbasis riset namun tetap aplikatif inilah yang membuat konsep ekonomi sirkular tidak berhenti sebagai jargon, melainkan hadir sebagai strategi nyata yang dapat dijalankan dan dikembangkan langsung oleh petani.

Pembiayaan inovatif “modal bertingkat”

Model pembiayaan inovatif yang diujicobakan menggunakan pendekatan “modal bertingkat”. Artinya, dukungan tidak hanya diberikan dalam bentuk bantuan alat produksi, tetapi juga pendampingan menyeluruh dari hulu hingga hilir. Petani mendapatkan peningkatan kapasitas teknis dalam produksi biochar, sekaligus penguatan di sisi hilir, mulai dari pengemasan, pemenuhan standar mutu, uji laboratorium, hingga strategi pemasaran berbasis bukti. Dengan pendekatan ini, desa tidak hanya mampu memproduksi, tetapi juga siap bersaing di pasar.

Dari kolaborasi tersebut, lahirlah produksi biochar berbahan baku sekam padi sesuai dengan standar mutu pasar. Biochar sendiri merupakan arang hayati hasil pembakaran biomassa dengan teknologi terkontrol, yang bermanfaat untuk memperbaiki kesuburan tanah, meningkatkan daya simpan air, dan mengikat karbon dalam jangka panjang. Produk ini sangat relevan bagi desa yang mayoritas warganya bermata pencaharian petani, karena manfaatnya dapat langsung dirasakan di lahan pertanian mereka sendiri.

Dampak yang diharapkan pun bersifat terukur. Dari sisi lingkungan, penggunaan biochar mampu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Pembakaran terbuka sekam padi yang berkurang drastis, menjadikan emisi CO₂ dan polusi udara kian menurun. Sementara dari sisi ekonomi, biochar mulai dapat dipasarkan di sekitar desa karena para petani melihat langsung hasilnya di kebun mereka. Produk inipun membuka sumber pendapatan baru, meningkatkan daya beli rumah tangga, dan mendorong perputaran ekonomi lokal.

Dampak sosialnya pun tak kalah penting. Pelibatan perempuan dalam produksi dan distribusi

biochar memberi mereka penghasilan tambahan sekaligus ruang partisipasi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kerja kolektif dalam kelompok usaha memperkuat jejaring sosial desa, mempermudah berbagi pengetahuan, dan meningkatkan kapasitas bersama. Pada akhirnya, desa menjadi lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan masa depan.

Potensi kedepan

Keberhasilan model pembiayaan yang diterapkan di Ganesa Mukti, memiliki potensi besar untuk direplikasi di desa-desa lain yang memiliki limbah biomassa melimpah—mulai dari serbuk gergaji, tandan kosong sawit, ampas jagung, pelepah pisang, hingga rumput liar. Dengan penyesuaian konteks lokal, pendekatan ini berpotensi membuka babak baru pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan desa-desa di Indonesia. Jika pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, dan mitra pembangunan berani mengintegrasikan pendekatan “modal cerdas” ini ke dalam desain program, desa-desa di Indonesia tidak hanya akan tumbuh secara ekonomi, tetapi juga menjadi lebih tangguh dan berkelanjutan.



Foto 2. Pelatihan pembuatan biochar berbasis teknologi tepat guna dan terjangkau bersama UNSRI dan ICRAF, membuka jalan bagi petani desa mengubah limbah menjadi peluang.

Mengapa agroforestri butuh pembiayaan yang lebih sabar

Peran pembiayaan inovatif dalam mengatasi salah satu masalah terbesar agroforestri



Thifali Adzani

Financial and Economics Analyst



t.adzani@cifor-icraf.org

Saat saya dan tim turun ke lapangan untuk menghimpun informasi tentang pemanfaatan lahan, seringkali kami menjumpai lahan yang merupakan warisan dari pohon-pohon yang ditanam oleh generasi sebelumnya. Mereka yang menanam belum sempat menuai hasilnya. Ini membuat saya berpikir tentang agroforestri.

Agroforestri, dalam agenda kebijakan kerap disebut solusi penghidupan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Umum dipahami sebagai penanaman pohon di perkebunan, sistem ini menyediakan beragam jasa ekologis seperti menyangga keanekaragaman hayati, menambat karbon, serta menjaga resapan air tanah.

Dari sisi ekonomi, berlembar-lembar tabel *spreadsheet* yang kami olah memperlihatkan proyeksi keuntungan yang menjanjikan. Indikator seperti Net Present Value (NPV) dan Internal Rate of Return (IRR) selalu menunjukkan bahwa bisnis hijau ini menguntungkan, bahkan setara dengan bisnis lain.

Namun, ada satu indikator yang menjadi pembeda: waktu pengembalian modal (*payback period*) agroforestri jauh lebih panjang dibandingkan dengan jenis usaha lain yang tidak bergantung pada modal alam. Di sinilah persoalan agroforestri

bermula— sistem ini layak secara ekonomi, tetapi tidak kompatibel dengan kerangka pembiayaan yang menuntut hasil cepat.

Tidak *bankable*

Semua manfaat ekologis agroforestri akan kehilangan makna jika tidak berujung pada manfaat ekonomi yang nyata. Pasalnya, manfaat itu baru datang bertahun-tahun kemudian, dan bagi petani (juga kita semua) waktu itu berarti hal-hal yang konkret: biaya pendidikan, dapur yang tetap mengepul, tabungan rumah tangga yang tidak kosong.

Dalam kajian saya di Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur di tahun lalu misalnya, kopi yang berkualitas baru dapat dipanen setelah tiga tahun. Bahkan tanaman lain seperti cengkeh dan durian, baru benar-benar menghasilkan di tahun ketujuh. Ironisnya, modal untuk biaya produksi tetap harus dikeluarkan bahkan sebelum tanaman itu ditanam; mulai dari persiapan lahan, bibit, pupuk, hingga biaya pemeliharaan lainnya.

Petani paham betul bahwa bibit unggul dan pupuk bagus akan menghasilkan panen melimpah di tahun ke-3 atau ke-7. Akan tetapi pengeluaran untuk makan dan biaya perawatan kebun untuk hari ini, esok, dan setiap hari selama masa tunggu terus berjalan. Apalagi bila di fase awal juga ditanami tanaman semusim dengan pengelolaan dan kebutuhan yang lebih intensif.

Sistem perbankan konvensional kita umumnya tidak dirancang untuk waktu tunggu selama ini. Kredit bank biasanya meminta cicilan dimulai bulan depan, padahal pohon baru akan berbuah lima tahun lagi—nilai ekologis membutuhkan waktu untuk tumbuh. Akibatnya, usaha seperti agroforestri sering dianggap tidak *bankable*. Petani terpaksa memakai bibit seadanya dan input minimal, sehingga produktivitas cenderung rendah dan lingkaran kemiskinan pun berulang.

Berbagai pengalaman ini menyadarkan saya pada satu hal yang sering diabaikan dalam logika finansial konvensional yaitu waktu ekologis; waktu yang lebih lama untuk menumbuhkan nilai usaha yang berkelanjutan. Agroforestri sebagai wujud ekonomi hijau tidak bisa dipaksakan untuk tumbuh mengikuti ritme pasar, melainkan nilai yang dibangun perlahan dengan penuh kesabaran.

Pembiayaan yang lebih ‘sabar’

Modal perlu hadir justru pada fase paling sulit; ketika belum ada panen, tetapi biaya pengelolaan terus berjalan. Di sinilah pembiayaan yang inovatif menjadi penting. Kesabaran dan kehati-hatian menjadi prinsip kunci bagi investor karena, tidak seperti pembiayaan pada umumnya, ada masa tunggu bertahun-tahun di mana lahan hanya menyerap biaya tanpa menghasilkan sepeser pun rupiah. Bukan untuk



Foto 1. Agroforestri Kopi di NTT

mempercepat bagaimana suatu ekosistem bekerja, tetapi untuk menjembatani waktu ekologis dan kebutuhan ekonomi.

Ada bermacam-macam skema pembiayaan inovatif. Salah satu contohnya yang paling sederhana adalah Payment for Ecosystem Services (PES). Konsepnya seperti ini, sambil menunggu durian runtuh 7 tahun lagi, petani dapat memelihara lahan mereka—pohon-pohon tumbuh dan menyimpan karbon, menyerap air ke dalam tanah, dan jadi habitat bagi burung maupun hewan lainnya. Petani mendapatkan insentif tunai di tahun-tahun awal, semacam imbalan untuk kerja kerasnya untuk merawat

pepohonan, sebagai penyambung hidup hingga panen bisa dinikmati secara berkala.

Contoh lain yaitu *blended finance* atau pendanaan campuran dari berbagai sumber untuk membiayai berbagai fase usaha. Misalnya, pada tahap awal di tiga tahun pertama, usaha agroforestri kopi dapat didanai oleh hibah dari pemerintah, lembaga non-pemerintah, atau lembaga filantropi. Kemudian, setelah masuk masa panen, petani dapat mengajukan pinjaman murah dengan bunga rendah dan masa pinjam yang panjang. Setelah mulai masa produktif, investasi swasta (misalnya untuk alat pengolahan pasca panen) dapat masuk melalui perjanjian kerja sama dan sistem bagi hasil. Dana publik dan hibah dapat menurunkan risiko kekurangan modal di tahap awal, lalu pendanaan swasta dapat mengembangkan skala usaha untuk mengejar pengembalian modal.

Dari berbagai mekanisme tersebut, saya belajar bahwa persoalannya bukan pada lamanya waktu tunggu,

tetapi pada bagaimana kita mengelolanya. Insentif transisi memungkinkan masyarakat tetap mengelola lahannya, memenuhi kebutuhan hidup, dan menjaga komitmen ekologis hingga panen tiba.

Ternyata ekonomi hijau bukan sekadar tentang menambah aliran modal ke sektor berbasis pohon. Ia juga tentang menciptakan kepastian penghidupan melalui skema pembiayaan jangka panjang. Peran pembiayaan inovatif dalam upaya-upaya ini perlu dieksplorasi lebih jauh.

“Agroforestri menjadi berkelanjutan ketika seorang petani tetap bisa memberi makan keluarga dan menyekolahkan anaknya tahun ini, meskipun pohon yang ia rawat baru dipanen sepuluh tahun mendatang.”

Pembiayaan inovatif dapat membantu menyelaraskan waktu finansial dan waktu ekologis supaya investasi hijau benar-benar menjadi fondasi ekonomi rendah risiko dan bernilai lintas generasi.

Eksklusif di kiprahagroforestri.id

Peneliti yang betah turun ke desa

Peneliti senior ICRAF James “Jim” Roshetko mengenang 29 tahun di ICRAF menjelang masa pensiun

Di kalangan agroforestri, dia James Roshetko, saintis berpengalaman yang karyanya sudah dikutip ribuan kali. Di lingkungan CIFOR-ICRAF, dia adalah “Pak Jim” peneliti yang ramah dan suka bercanda. Sementara di desa, ada panggilan lain untuknya: “bule masuk kampung” — dan ia tidak keberatan dipanggil begitu.

Pertama kali bekerja bersama ICRAF pada 1997, Pak Jim resmi pensiun pada tahun 2026 di usia 64 tahun. Dalam artikel eksklusif di kiprahagroforestri.id, kami mengajak Pak Jim merefleksikan pengalamannya di ICRAF, termasuk satu kesempatan ketika dia disebut orang “Cina”. **Pindai kode QR ini untuk membaca artikelnya:**



agroforestri.id/ceritaJim



Pojok Publikasi



Rencana Usaha Tani Pertanian Ramah Lingkungan: Model Usaha Tani pada Agroekosistem Pasang Surut

Subekti Rahayu, Rujito Agus Suwignyo, Romadhona Hartiyadi, Thifali Adzani, Dewi Kiswani Bodro, Caecilia Yulita Novia, Oktariansyah Ade Pratama, Iskak Nugky Ismawan, Junaidi Hutasuht, Suyanto

Menyajikan panduan pertanian ramah lingkungan di lahan gambut Sumatra Selatan, khususnya di KHG Sungai Sugihan–Sungai Saleh dan Sungai Sugihan–Sungai Lumpur. Memuat prinsip pertanian berkelanjutan, model bisnis hijau, teknik budidaya, pemasaran, dan analisis keuangan untuk menjaga ekosistem gambut.

cifor-icraf.org/id/pengetahuan/publikasi/46228



Mendorong Penerapan Pertanian Cerdas Iklim (Climate-Smart Agriculture/CSA) melalui Penguatan Kapasitas Petani Swadaya: Pembelajaran dari Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat

Dikdik Permadi, Riyandoko, Ni'matul Khasanah

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki potensi kakao, karet, kopi, dan sawit, namun masih didominasi sistem monokultur yang rentan iklim dan pasar. Penerapan CSA berbasis agroforestri melalui pendekatan ADKAR memperkuat ketahanan petani serta melahirkan 24 agen untuk memperluas praktik berkelanjutan.

cifor-icraf.org/id/pengetahuan/publikasi/46068

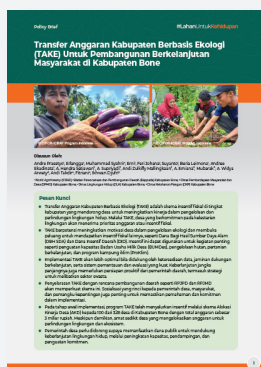


Panduan Pelatihan Agroforestri Kelapa Sawit

Dikdik Permadi dan Endri Martini

Buku ini disusun sebagai panduan untuk perseorangan ataupun organisasi yang akan melakukan kegiatan pelatihan untuk pelatih (ToT) atau peningkatan kapasitas para pelatih atau penyuluh dalam melakukan perancangan dan pembangunan agroforestri sawit.

cifor-icraf.org/id/pengetahuan/publikasi/18425



Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) untuk Pembangunan Berkelanjutan Masyarakat di Kabupaten Bone

Andre Prasetyo, Erlangga, Muhammad Syahrir, Erni, Feri Johana, Suyanto, Beria Leimona, Andree Ekadinata, A. Hendra Setiawan, A. Supriyadi, Andi Zulkifly Mallingkaan, A. Erniana, Mubarak, A. Widya arwaty, Andi Takdir, Fitriani, Ikhwani Djufri

Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) adalah skema pembiayaan inovatif yang memberi insentif pada desa atas kontribusi pada pelestarian lingkungan. Pendekatan TAKE yang dikembangkan oleh CIFOR-ICRAF Indonesia dan Kabupaten Bone dalam riset-aksi Land4Lives mengintegrasikan indikator ekologi ke dalam struktur Alokasi Dana Desa (ADD) melalui komponen baru bernama Alokasi Kinerja Desa (AKD).

publikasi.agroforestri.id/sea/detail?pubID=5347



CIFOR-ICRAF Program Indonesia

Pusat Penelitian Kehutanan Internasional dan World Agroforestry (CIFOR-ICRAF) memanfaatkan sumber daya pepohonan, hutan, dan bentang alam agroforestri untuk menghadapi tantangan terberat dunia saat ini – berkurangnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim, ketahanan pangan, kesejahteraan, dan ketidaksetaraan.

Koleksi publikasi dapat diakses melalui:
www.cifor-icraf.org/knowledge/publications

Informasi lebih lanjut:

 icraf-indonesiamedia@cifor-icraf.org

 CIFOR_ICRAF_ID;  www.cifor-icraf.org/locations/asia/indonesia